

**TESIS**

**PELUANG LAPANGAN KERJA BAGI PEMUDA DALAM  
PROYEK REKLAMASI KAWASAN PANTAI TEMBOK  
BERLIN DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

***EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR YOUTH  
IN THE BERLIN WALL COASTAL RECLAMATION PROJECT  
IN THE CITY OF SORONG WEST PAPUA***

disusun dan diajukan oleh

**KUN AMIRUDDIN SYAFAAT  
P022171323**



kepada

**PROGRAM MAGISTER  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH /  
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PEMUDA SEKOLAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PELUANG LAPANGAN KERJA BAGI PEMUDA DALAM  
PROYEK REKLAMASI KAWASAN PANTAI TEMBOK  
BERLIN DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

***EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR YOUTH  
IN THE BERLIN WALL COASTAL RECLAMATION PROJECT  
IN THE CITY OF SORONG WEST PAPUA***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun dan diajukan oleh

**KUN AMIRUDDIN SYAFAAT**

Kepada

**JURUSAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



LEMBAR PENGESAHAN

TESIS  
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

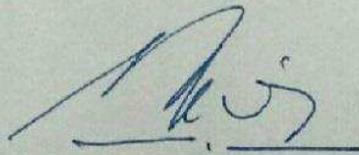
PROYEK REKLAMASI KAWASAN PANTAI TEMBOK  
BERLIN TERHADAP PENYERAPAN LAPANGAN KERJA  
PEMUDA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

disusun dan diajukan oleh

KUN AMIRUDDIN SYAFAAT  
P022171323

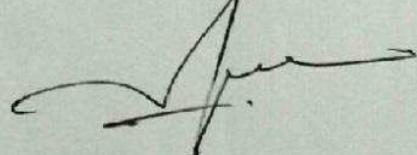
telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan  
Makassar, 25 April 2019  
Komisi Penasihat

Ketua



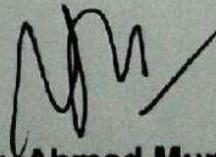
Prof. Dr. -Ing. M. Yamin Jinca, MSTr

Anggota



Prof. Dr. Muh. Asdar, SE. M.Si

Ketua Program Studi Magister  
Perencanaan Pengembangan Wilayah/  
Manajemen Kepemimpinan Pemuda  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng  
NIP 196207271989031003



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Kun Amiruddin Syafaat

NIM : P022171323

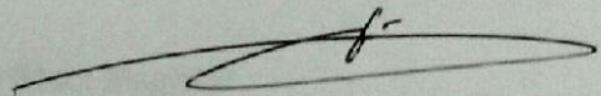
Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah/

Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Mei 2019

Yang menyatakan



**KUN AMIRUDDIN SYAFAAT**



## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah akhir ini. Penulisan karya akhir ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Magister pada Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Karya tulis ilmiah ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membimbing, memberi dorongan motivasi dan memberikan bantuan moril dan materi. Ungkapan terima kasih dan rasa hormat penulis haturkan kepada :

1. **Prof. Dr. -Ing. M. Yamin Jinca, MSTr** sebagai pembimbing 1 yang senantiasa memberi kesempatan yang luas dan senantiasa memotivasi dalam menyelesaikan karya ini.
2. **Prof. Dr. Muh. Asdar, SE. M.Si** sebagai pembimbing 2 yang senantiasa memberi masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan karya ini.
3. **Prof. Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec , Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA. ,**  
**rs. Hasbi, M.Si, Ph.D** Sebagai penguji yang senantiasa memberikan saran dalam menyelesaikan karya ini.



4. Muhammad Yauri yang senantiasa memberi masukan dalam menyelesaikan karya ini.
5. Staf Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah yang tidak pernah jemu memberi arahan pada karya tulis ini.
6. Kementerian Pemuda Dan Olahraga atas kerjasamanya selama studi.
7. Seluruh Staff Sekolah Pasca Sarjana UNHAS yang mendukung dan membimbing penulis selama studi.
8. Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Pasca Sarjana Asisten Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang telah memberi kesempatan pada kami untuk mengikuti Pendidikan Magister Universitas Hasanuddin.
9. Masyarakat Kota Sorong Besarta Instansi yang terkait yang penulis belum bisa sebutkan satu per satu yang telah memberi segala fasilitas dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Bapak dan Ibu penulis, H.Supangat Arief, S.Ag, dan Hj. Siti Masilah, dan Mertua H.Rojikin S.Pd dan Hj. Sohriati, Serta Kakak penulis Ana Ismaulana Syafaat, S.Kep dan Leni Aisyatun Syafaat, S.Pd, Serta Mas Tugiman S.Pd dan Tak terlupakan Keluarga kecil penulis Istri tercinta dr. Nur Rezky Eko Putri, Serta Jagoan pertama Nabel Hamdan Syafaat, serta Jagoan Kecil Efran Banna Syafaat,serta Adik Ipar Nur Fadillah Rahmatullah, .Farm dan Nur 'Aida Hafizha penulis haturkan segala hormat dan



terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doanya yang tulus dan tanpa henti.

11. Sahabat Abdullah Gazam Selaku Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Sekaligus Ketua DPW PKB Papua Barat Serta Sahabat - Sahabat Anak Muda Indonesia atas kesabaran, pengertian dan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan.
12. Mas Mawardi Nur Selaku Anggota DPRD Kab. Sorong Yang selalu memberi motivasi dan memberi teladan serta inspirasi bagi penulis dan Juga Teman Teman Laskar Muda Sorong atas kesabaran, dukungan selama penulis mengikuti pendidikan.
13. Bapak Rico Sia selaku Anggota DPR RI yang baru saja Terpilih, yang telah mengajarkan arti sebuah perjuangan dan selalu memberikan motivasi juga arahan – arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
14. M.Afif Darwis, S.Pd.I, ME. Beserta Keluarga Besar Ikatan Keluarga Pondok Modern Cabang Sulawesi Selatan (IKPM Sul Sel) yang telah menjadi rumah kedua penulis dalam menyelesaikan tesis.
15. Sahabat – Sahabat Angkatan 2017 Perencanaan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda yang selalu kompak sampai kapanpun yang insya Allah akan menjadi pemimpin – pemimpin masa depan yang tak hentinya memberikan support

epada penulis.



Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk rekan sejawat meneliti dan menyempurnakan tema ini lebih lanjut. Penulis juga menyadari karya ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan dan segala yang tidak berkenan pada karya ini, dan mengharapkan saran serta kritikan yang membangun untuk kesempurnaan karya tulis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah mendidik dan membantu penulis selama pendidikan hingga karya tulis ini selesai.

Makassar, 5 Mei 2019



## ABSTRAK

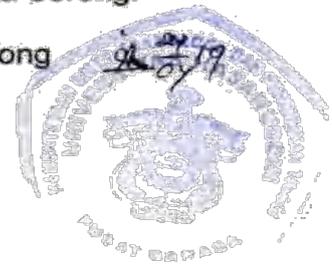
**KUN AMIRUDDIN S.**, *Proyek Reklamasi Kawasan Pantai Tembok Berlin terhadap Penyerapan Lapangan Kerja Pemuda di Kota Sorong, Papua Barat* (dibimbing oleh Muhammad Yamin Jinca dan Muhammad Asdar).

Penelitian ini bertujuan mengetahui kontribusi proyek reklamasi kawasan pantai tembok Berlin terhadap penyerapan lapangan kerja pemuda lokal di Kota Sorong dan penerimaan/apresiasi pemuda Kota Sorong dari proyek reklamasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskripsi dan dilaksanakan di kawasan pantai tembok Berlin Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Indonesia.

Hasil penelitian terkait kontribusi proyek reklamasi membuktikan adanya penyerapan dalam hal lapangan kerja. Proyek reklamasi yang saat ini masih dalam tahap pembendungan dan penimbunan saja terdapat berbagai lapangan kerja baru, apalagi nanti ketika reklamasi ini telah rampung dan sesuai dengan harapan bersama akan banyak sekali lapangan kerja baru yang sangat berpeluang untuk mempekerjakan karyawan dengan jumlah besar. Dampak dari hal tersebut dapat memotivasi pemuda di Kota Sorong untuk bekerja di wilayah lokasi reklamasi. Dengan kata lain, kontribusi proyek reklamasi di Kawasan Pantai Tembok Berlin ini dapat melibatkan pemuda lokal Papua. Hal itu diperkuat dengan sikap pemerintah yang berkomitmen dalam memberdayakan sumber daya manusia lokal yang tertuang dalam perjanjian MOU dengan pihak pengembang. Penerimaan dan apresiasi pemuda terhadap lapangan kerja yang baru dilihat dari motivasi internal pemuda, yaitu prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab termasuk baik. Motivasi eksternal baik, serta gaji, imbalan, dan kondisi kerja cukup baik dengan kepuasan gaji yang cukup. Kesenjangan ekonomi sedikit terjadi di antara para pemuda. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sehingga sebagian pemuda lebih cenderung mendapatkan posisi struktur dalam pekerjaan yang biasa saja. Akhir-akhir ini topik mengenai masalah pemuda, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan suatu hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda di Kota Sorong.

Kata kunci: tembok Berlin, reklamasi pantai, Kota Sorong



## ABSTRACT

**KUN AMIRUDDIN S.** *Reclamation Project of Coast Area of Tembok Berlin toward the employment of youth workers in Sorong City Papua Barat, (supervised by Muhammad Yamin Jinca and Muhammad Asdar).*

This research aims to determine what contribution of reclamation project of the Tembok Berlin area coast toward the employment of youth workers in Sorong City and the appreciation of the youth towards the project.

This study is the qualitative research. Data were analyzed descriptively and conducted in Sorong city, Papua Barat.

The results indicate that, since the project started the embankment and piling, it has employed many workers. This gives motivation to the youth workers on reclamation project. The contribution of the project to involve the youth is very much, this is in line with the government's commitment and attitude to empower the human resources which is embodied in MOU with the Developer. External motivation and work condition is good enough with satisfactory salary. Economic gap among the youths a little bit occurs because the lower education so that the number of the youths get ordinary level of job. The high economic growth needs more investment and the economic policy is an important thing to the economic growth. The increasing of new investment is able to support the growth of economy which is able to create the new field of work.

**Keywords:** Tembok Berlin, Costal Reclamation, Sorong City



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Aktivitas Mata Pencaharian Di Wilayah.....	8
B. Daya Serap Terhadap Lapangan Pekerjaan.....	18
C. Faktor Perubahan Lapangan Kerja.....	22
D. Hasil Penelitian Relevan.....	26
E. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Rancangan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis Data Penelitian.....	35
D. Teknik Pengambilan Sampling.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Pengolahan Data.....	39
G. Analisis Data.....	40



H. Informan Penelitian.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kota Sorong.....	43
1. Kesejahteraan Penduduk Kota Sorong.....	46
2. Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Kota Sorong.....	47
B. Deskripsi hasil penelitian.....	49
C. Peluang Lapangan Kerja Pemuda Pada Proyek Reklamasi .....	58
1. Persepsi Pemuda Terhadap Reklamasi.....	58
2. Klasifikasi Pemuda Papua Pada Lapangan Kerja Reklamasi.....	61
D. Penerimaan dan Apresiasi Pemuda Terhadap Lapangan Kerja Baru....	63
1. Penerimaan.....	63
2. Apresiasi.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
LAMPIRAN I : Gambar Pekerjaan Proyek Reklamasi.....	72
LAMPIRAN II : Gambar Aktifitas Kegiatan Di Tembok Berlin.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
Website.....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Distrik Di Kota Sorong .....	46
Tabel 2	Mengetahui penyebab informan bekerja .....	52
Tabel 3	Penyebab informan bekerja di proyek reklamasi .....	53
Tabel 4	Pendapat Informan mengenai proyek reklamasi .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 2	Teknik analisis data. ....	42
Gambar 3	Skema lapangan kerja pemuda pada proyek reklamasi .....	56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Terciptanya lapangan kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang dengan tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi secara merata di setiap tempat. Kondisi saat ini, pembangunan ekonomi tidak bisa terlepas dengan pandangan pembangunan modern yang memiliki suatu pola yang berbeda dengan pembangunan tradisional. Indikator pembangunan modern tidak hanya dilihat dari kenaikan pendapatan semata, tetapi lebih mengedepankan dalam hal penuntasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan lapangan kerja.

Di Indonesia, lapangan kerja menjadi perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbicara tentang pembangunan ekonomi nasional dan lapangan kerja, tidak terlepas dari peran pemuda, hal itu tergambarkan oleh peran pemuda dalam membangun ekonomi di masing-masing daerah, dimana pemuda dalam pembangunan daerah memiliki kontribusi kepada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Di Papua Barat, pembangunan ekonomi secara modern terus berkembang, hal itu ditandai dengan ramainya pembangunan



gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hunian dengan konsep pembangunan modern yang begitu banyak menghadirkan lapangan pekerjaan baru di Papua Barat.

Salah satu wujud dari pembangunan ekonomi dan pembangunan modern di Papua Barat yaitu dengan di rancangannya reklamasi di wilayah Kawasan Tembok Berlin Kota Sorong sejak tahun 2013. Pengembangan wilayah kawasan tembok berlin itu dimulai dengan penimbunan menggunakan batu gunung, jarak yang ditimbun dari bibir pantai kurang lebih 240 meter dan kedalaman laut hanya 4-6 meter dengan luas sekitar 25 hektar. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan kawasan tersebut akan dibangun perhotelan, restoran, kawasan wisata, taman hijau dengan konsep modern seperti di beberapa negara Asia.

Konsep pembangunan yang dijelaskan oleh pihak investor PT Modern Muli Graha Grup melalui Konsultan perusahaan Henry Kusnadi mengatakan konsep bangunan atau master plan diadopsi dari beberapa kota besar negara Asia seperti Hongkong dan Jepang. Kawasan Tembok Berlin tersebut akan ditata menjadi lokasi komersil yang nyaman dan maksimal bagi siapapun yang berkunjung ke kota sorong, serta daerah tujuan wisata Raja Ampat, akan tetapi pada awal kehadiran reklamasi masih saja menjadi kontroversi dikalangan

asyarakat yang didampingi oleh lembaga swadaya atau lembaga  
uan hukum.



Melihat kehadiran reklamasi, hal itu memang merupakan suatu kegiatan yang akan menjadi kontroversi terus menerus jika tidak diketahui tujuan dan berbekal pengetahuan singkat akan adanya reklamasi. Hal itu yang terjadi dikalangan masyarakat yang berhasil terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak mendapatkan keuntungan dengan adanya proyek ini.

Pada dasarnya, kehadiran reklamasi selalu menghadirkan dampak positif dan negatif, jika kita melihat dari hasil kajian yang ada. Dalam beberapa kajian yang dilakukan, reklamasi merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas sarana prasarana yang disediakan pihak swasta, Pemerintah Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong. Oleh karena itu, pembangunan reklamasi terus di tingkatkan dan dikembangkan, salah satu tujuan positif dari reklamasi yaitu untuk memperluas lapangan kerja khususnya bagi pemuda yang pastinya akan memberikan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, reklamasi dan pemuda menjadi objek penelitian. Reklamasi di prioritaskan di wilayah Kawasan Tembok Berlin Kota Sorong (KTBKS) dimana berfokus pada penyerapan tenaga kerja pemuda dan mempekerjakan pemuda disekitar Kawasan Tembok Berlin dan pemuda yang ada di Kota Sorong yang

ekat dari wilayah Kawasan Tembok Berlin. Pemuda dapat  
tegorikan berdasarkan UUD No 40 Tahun 2009 dengan usia 16-



30 tahun yang diharapkan dapat bekerja pada wilayah reklamasi di Kota Sorong yang terdapat di wilayah Kawasan Tembok Berlin Kota Sorong (KTBKS).

Perkembangan pembangunan modern dan lapangan kerja pemuda di Kota Sorong cenderung menyisahkan pertanyaan, salah satu pertanyaan pemuda dalam hal kependudukan yang muncul di Kota Sorong yaitu terkait dengan perpindahan pemuda yang menyebabkan terjadinya sirkulasi.

Sirkulasi merupakan salah satu isu kependudukan yang penting dan mendesak untuk segera ditangani secara menyeluruh karena menyebabkan perpindahan penduduk tidak menetap, namun ada juga yang menetap atau tinggal sementara waktu di daerah tujuan.

Meski harus diakui bahwa tidak ada negara di era industrialisasi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berarti tanpa sirkulasi, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa dampak sirkulasi menciptakan masalah kemiskinan beragam akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan, ketidaksiapan infrastruktur, perumahan dan layanan publik. Laporan *State of World Population 2007* memberikan gambaran sirkulasi dunia, bahwa pada tahun 2015, lebih dari separuh penduduk dunia yaitu 3,3 milyar jiwa akan tinggal di Daerah Urban.

ka ini akan naik tajam menjadi 5 milyar pada tahun 2030 (Jurnal hari, 2015).



Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka diperlukan suatu penelitian mengenai permasalahan yang menjadi kajian utama dengan judul *Peluang Lapangan Kerja Bagi Pemuda*. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai bagaimana proyek reklamasi terhadap penyerapan lapangan kerja bagi pemuda, Oleh sebab itu berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik mengangkat judul tesis ***“Peluang Lapangan Kerja Bagi Pemuda Dalam Proyek Reklamasi Kawasan Pantai Tembok Berlin Di Kota Sorong Papua Barat”***.

## B. Rumusan Masalah

Dampak reklamasi saat ini yang sering terjadi adalah, relokasi pemukiman khususnya masyarakat pesisir, sebagai akibat penataan kota, akan mengakibatkan perubahan lapangan kerja. Untuk mengkaji lebih jauh masalah ini, penelitian berfokus pada dua pertanyaan sebagai berikut,

1. Bagaimana Kontribusi proyek reklamasi terhadap peluang terciptanya Lapangan kerja pemuda di Kawasan Pantai Tembok Berlin ?
2. Bagaimana penerimaan dan apresiasi terhadap lapangan kerja pada proyek reklamasi ?



## an Penelitian

Kehadiran reklamasi selalu menghadirkan dampak positif dan negatif, jika dilihat dari hasil kajian yang ada. Reklamasi merupakan

kegiatan yang didukung berbagai fasilitas sarana prasarana yang disediakan pihak swasta, Pemerintah Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proyek reklamasi terhadap peluang terciptanya lapangan kerja bagi pemuda di Kawasan Pantai Tembok Berlin.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan apresiasi pemuda di Kota Sorong dalam menjalani pekerjaan yang ada (baru).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Perencanaan Pengembangan Wilayah khususnya dalam Manajemen Kepemimpinan Pemuda yang berkaitan dengan lapangan kerja pemuda di Distrik Sorong Kota akibat dari Reklamasi.
2. Manfaat Praktis, menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait mengenai strategi Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kota Sorong, dan Pihak pengembang dalam menjalankan reklamasi.



3. Manfaat Metodologis, hasil dari penelitian ini dapat memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Khususnya yang mengkaji masalah reklamasi dan dampaknya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengkaji dan membahas masalah yang peneliti angkat, maka digunakan konsep teori perubahan kehidupan dalam hal ekonomi yaitu pekerjaan bagi pemuda di Kawasan Tembok Berlin, aspek lingkungan, yang sangat menonjol yaitu bahwa kawasan reklamasi umumnya memiliki status sebagai sumber daya milik bersama. Akibatnya pemanfaatan sumber daya kawasan reklamasi menjadi tidak bisa dikontrol karena tidak ada keputusan kolektif. Kelebihan pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya terjadi dimana-mana yang akhirnya membuat sumber daya rusak dan memberikan produktivitas, hasil, dan pendapatan yang rendah. Gejala ini disebut dengan tragedi milik bersama (*Tragedy of the Common*).

#### A. Aktivitas Pekerjaan Di Wilayah Pesisir

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai 14.572 (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP 2017) dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di



dunia setelah Kanada yang mencapai lebih kurang 81.000 km (Dahuri 2001).

Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 262 juta jiwa (BKKBN 2018). Lebih kurang sebanyak 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di Sekitar Wilayah Pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumber daya di sekitarnya (Dahuri, 2014).

Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu pulau yang sebagian besar wilayahnya (62%) merupakan perairan laut, selat dan teluk, sedangkan 38% lainnya adalah daratan yang didalamnya juga memuat kandungan air tawar dalam bentuk sungai, danau, rawa, dan waduk. Demikian luasnya wilayah laut di Indonesia sehingga mendorong masyarakat yang hidup di sekitar wilayah laut memanfaatkan sumber kelautan sebagai tumpuan hidupnya. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan ini memberikan identitas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan pola hidup dan karakteristik tersendiri.

Wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, ekologi dan budaya, yang menjadi batas antara daratan dan lautan, di mana di

ada terdapat suatu kumpulan manusia yang memiliki pola hidup dan perilaku serta karakteristik tertentu. Masyarakat pesisir ini menjadi



tuan rumah di wilayah pesisir sendiri. Mereka menjadi pelaku utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta pembentuk suatu budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir. Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir kurang terbuka terhadap teknologi dan tidak cocoknya pengelolaan sumber daya dengan kultur masyarakat setempat (Dahuri. 2015).

Secara teoritis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di Wilayah Pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan (Sunarto, 2014).

Masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah

dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara g pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri



dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain. Harus diketahui bahwa setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda (Sunartono. 2011).

Menurut Sunartono (2011), Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Berdasarkan data BPS kota sorong Jumlah Penduduk di Distrik Sorong Kepulauan tahun 2017 sebanyak 11.140 jiwa, sekitar 69,36% merupakan nelayan sedangkan sisanya terdiri dari pedagang, buruh, PNS, swasta dan lain-lain. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah, dimana penduduk distrik kepulauan Kota Sorong sekitar 4.200 jiwa hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD), 1.150 jiwa tamat SMP dan 976 jiwa tamat SMA dengan fasilitas pendidikan yang ada masih sangat terbatas.

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat eraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap laya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan



masyarakat. Masyarakat pesisir juga dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktifitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan (Sinopsis, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB,Bogor).

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. “Nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat *open acces* dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan cenderung memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka” (Miles et, al. 1992).

Karakteristik lain yang sangat mencolok di kalangan masyarakat pesisir, terutama masyarakat nelayan, adalah ketergantungan mereka pada musim. Ketergantungan pada musim ini akan semakin besar pada

kecil. Pada musim penangkapan, para nelayan akan sangat sibuk. Sebaliknya, pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi



berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. Keadaan ini mempunyai implikasi besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pantai secara umum dan kaum nelayan khususnya. Mereka mungkin mampu membeli barang-barang yang mahal pada musim tangkap. Namun pada musim peceklik, pendapatan mereka drastis menurun sehingga kehidupan mereka juga semakin buruk. Belum lagi ditambah pola hidup mereka yang menerapkan prinsip ekonomi yang “tidak hemat”, artinya saat hasil tangkap memuncak, mereka cenderung tidak menyimpan hasil untuk menutupi kekurangan ekonomi di saat kegiatan tangkap menurun sehingga banyak dari nelayan-nelayan tersebut yang harus meminjam uang bahkan menjual barang-barang mereka untuk memenuhi kebutuhannya (Miles, et, al. 1992).

Secara umum, pendapatan nelayan memang sangat berfluktuasi dari hari ke hari. Pada suatu hari, mungkin nelayan memperoleh tangkapan yang sangat tinggi, tapi pada hari berikutnya bisa saja “kosong”. Hasil tangkapan dan pada gilirannya pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh jumlah nelayan operasi penangkapan di suatu daerah penangkapan. Di daerah yang padat penduduknya, akan mengalami kelebihan tangkap (*overfishing*). Hal ini mengakibatkan volume hasil tangkap dari para nelayan menjadi semakin kecil, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan mereka.



ondisi di atas turut pula mendorong munculnya pola hubungan yang sangat umum dijumpai di kalangan masyarakat di kalangan

nelayan maupun petani tambak, yakni pola hubungan yang bersifat *patron-klien*. Karena keadaan ekonomi yang buruk, maka para nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau dari para pedagang pengumpul (*tauke*).

Konsekuensinya, para peminjam tersebut menjadi terikat dengan pihak juragan atau pedagang. Keterkaitan tersebut antara lain berupa keharusan menjual produknya kepada pedagang atau juragan. Pola hubungan yang tidak simetris ini tentu saja sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi (Miles et, al, 1992). Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan.

#### 1. Dampak Reklamasi

Sebagai proses perubahan yang terencana, jelas bahwa masalah sosial yang timbul bukan merupakan hal yang ikut direncanakan. Oleh sebab itu, maka lebih tepat disebut sebagai efek sampingan atau dampak dari proses pembangunan masyarakat. Mengingat bahwa gejala sosial merupakan fenomena yang saling terkait, maka tidak mengherankan jika

an yang pada salah satu atau beberapa aspek, yang dikehendaki  
ak dikehendaki, dapat menghasilkan terjadinya perubahan pada



aspek yang lain. Terjadinya dampak yang tidak dikehendaki itulah yang kemudian dikategorikan sebagai masalah sosial. Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak ini pun mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat disekitar (Sunartono, 2014).

a. Dampak positif.

Secara umum dampak positif dari kegiatan reklamasi sesuai dengan tujuan diadakannya reklamasi, seperti menghidupkan kembali, membuka peluang pembangunan wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari, serta meningkatkan pendapatan daerah. Kegiatan reklamasi antara lain tentunya pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, perbaikan rejim hidraulik kawasan pantai, dan penyerapan tenaga kerja. Reklamasi banyak memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. Praktek ini memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran wilayah, penataan daerah pantai, menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari. Pulau hasil reklamasi dapat menahan gelombang pasang



yang mengikis pantai, Selain itu juga dapat menjadi semacam bendungan untuk menahan banjir rob di daratan ( Maskur, 2008).

b. Dampak negatif.

Perlu diingat pula, reklamasi merupakan hasil campur tangan manusia terhadap alam, sehingga memungkinkan semua kegiatan ini juga membawa dampak buruk. Diantara dampak negatif reklamasi pantai pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejim air tanah, peningkatan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Sedangkan, dampak biologis berupa terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan penurunan keanekaragaman hayati (Sunartono, 2014)

Dahuri (2015) menjelaskan bahwa, adanya kegiatan ini, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena dimanfaatkan untuk kegiatan privat. Keanekaragaman biota laut juga akan berkurang, baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari aslinya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah di luar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga



kemungkinan akan terjadi abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob.

Disamping itu, reklamasi pantai juga berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah nelayan dan buruh, sehingga adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka. Kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan ( Asballah, 2003).

Bengen G (2001) menjelaskan bahwa, ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan sehingga apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem.

Terganggunya ekosistem perairan pantai dalam waktu yang lama, pasti memberikan kerusakan ekosistem wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai. Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urugan yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas, penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan mengganggu kesehatan masyarakat. Sehingga untuk meminimalkan dampak fisik,

, sosial ekonomi dan budaya negatif serta mengoptimalkan positif, maka kegiatan reklamasi harus dilakukan secara hati-hati



dan berdasar pada pedoman yang ada dengan melibatkan *stakeholder*. Pada dasarnya, reklamasi harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dengan orientasi jangka panjang (Asballah, 2003).

## B. Daya Serap Lapangan Pekerjaan

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan dan memiliki sasaran untuk menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mampu dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan memiliki arti luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan.

Keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lokasi lapangan kerja bagi masyarakatnya, dengan penciptaan tempat lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Iwan Nugroho, 2014)

salah penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang seluruh negara yang ada, baik negara maju maupun negara



berkembang. Walaupun intensitas masalah tersebut berbeda-beda karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang digunakan, dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, perluasan kesempatan kerja dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output perkapita secara konstan dalam jangka panjang (Iwan Nugroho, 2014).

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia pada sepuluh tahun terakhir ini telah meningkat sebesar 1,49%. Kenaikan jumlah penduduk otomatis jumlah angkatan kerja di Indonesia juga akan meningkat karena jumlah angkatan kerja ini berhubungan positif dengan banyaknya jumlah tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun yang sama yaitu berjumlah 105,80 juta jiwa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (Untuk Regional Atau Daerah) yang dihasilkan di negara tersebut setiap tahunnya. Namun, fenomena yang sekarang terjadi di Indonesia adalah laju pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kemampuan menyerap tenaga kerja rendah. Ini

arena pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh konsumsi tingkat yang besar bukan dari investasi.



Hal ini bisa dilihat dari jumlah PDB Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan jenis penggunaannya yang menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga kontribusinya adalah sebesar 57.56%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pembentukan modal tetap yang kontribusinya hanya mencapai angka 22.46% dari total PDB (BPS, 2015).

Masalah-masalah lapangan kerja bersifat multidimensi, mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks, sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan yang multidimensi pula. Kesuksesan perkembangan kemaritiman haruslah dirasakan oleh masyarakat pesisir di sekitarnya yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan memiliki pendidikan yang rendah sehingga perlu menjadi perhatian upaya peningkatan taraf hidup rakyat di daerah pesisir dan penanggulangan masalah pengangguran. Kehidupan nelayan sampai saat ini belum dapat dikatakan layak bahkan jauh dari kata sejahtera. Jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Jumlah 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.600 desa nelayan miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air. Di daerah pesisir banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ikan yang tentunya membutuhkan pekerja dibawah

asas Disnaker dan Pemerintah Daerah (Sunarto, 2011).



Dinamika yang muncul di masyarakat pesisir tersebut berpotensi menimbulkan angkatan pengangguran kerja. Untuk mencegah ke arah peningkatan kriminalitas dalam memperoleh mata pencaharian baru maka pemerintah daerah yang memiliki komunitas masyarakat pesisir bertanggung jawab dalam membina masyarakat pesisir tersebut yang tentunya masih tergolong dalam angkatan kerja yang masih produktif.

Selama ini yang sering menjadi perhatian adalah perluasan kerja dalam hubungan kerja yang terjadi antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja sementara yang perlu menjadi perhatian adalah perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Dimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor berdasarkan kewenangannya (Sunarto, 2011).

Karakteristik nelayan yang berkomunitas dalam masyarakat pesisir adalah pekerja diluar hubungan kerja, mereka tidak bekerja pada pihak lain namun berwirausaha melakukan pekerjaannya sendiri. Hal tersebutlah yang memerlukan pembinaan dan keterlibatan baik dari Pemerintah

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta dan kelembagaan tingkat. Dukungan permodalan yang masih lemah terhadap sektor



kelautan dan perikanan menghambat nelayan untuk bangkit dari keterpurukan (Purwanti, 2014).

Program pembiayaan bagi usaha kecil menengah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi hingga kini masih sulit dijangkau oleh nelayan, hal ini dikarenakan pengajuan kredit bank harus dilengkapi dengan agunan berupa sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Gubernur BI Darmin Nasution serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan kesepakatan bersama mengenai kapal nelayan berukuran 20 meter kubik atau berbobot mati 5 ton yang bisa dijadikan agunan. Hal ini memudahkan pembiayaan nelayan. Hingga, Diperlukan strategi dalam pelaksanaan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dengan melibatkan berbagai sektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta yang bertujuan mengoptimalkan angkatan kerja di daerah pesisir (Purwanti, 2014).

### C. Faktor Perubahan Lapangan Kerja

Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Phill A. (1977) menjelaskan bahwa, perubahan sosial terjadi memang telah ada sejak zaman dahulu. Ada kalanya perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung demikian cepatnya, yang dapat membingungkan manusia yang menghadapinya.



Pada tahun 1995, *International Labor Organization* (ILO) menyebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia sama atau lebih dari lima belas tahun sampai usia enam puluh tahun. Penduduk usia kerja tersebut dikenal sebagai tenaga kerja. Indonesia tidak menganut batas maksimum usia kerja. Alasannya, Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian penduduk yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta. Untuk golongan ini pun, pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk dalam usia pensiun masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.

Banyaknya pencari kerja dibandingkan dengan banyaknya angkatan kerja adalah indikator tinggi rendahnya pengangguran di suatu wilayah dan waktu tertentu. angka pengangguran akan fluktuasi dari tahun ketahun karena perubahan pada angkatan kerja, tidak persis diimbangi oleh perubahan pada kesempatan kerja. Kesempatan kerja berubah karena adanya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan beberapa sektor dalam perekonomian menurun dan sektor-sektor lain berkembang.

Novanto (2015), menyatakan bahwa kesempatan kerja pertanian di daerah pedesaan semakin menurun akibat berkurangnya lahan dan daya tarik perkotaan dengan beragam pekerjaan yang lebih nyaman dilakukan di pedesaan. Budiharsono (2014), yang melakukan penelitian tentang transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi antar



daerah di Indonesia 1967-1987 menyatakan bahwa transformasi struktur produksi dan perubahan tenaga kerja antara daerah berbeda dengan pola normalnya, hal ini disebabkan relatif kecilnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor non pertanian baik dalam proses produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Selama proses transformasi, sektor industri (non pertanian) sedikit menggunakan bahan baku dari sektor pertanian juga sektor industri kurang dapat menyerap tenaga kerja yang bergeser dari sektor pertanian.

Novanto (2015), kembali menjelaskan bahwa, kesempatan kerja terkait dengan kehidupan ekonomi yang selalu dinamis, dimana ada kegiatan-kegiatan yang baru timbul, ada yang maju berkembang, meningkat, berpindah dan ada pula yang mundur dan hilang. Pergerakan dan perubahan-perubahan tersebut merupakan proses simultan atau sering diistilahkan dinamika. Jumlah penduduk yang semakin meningkat merupakan sinyal bahwa pertumbuhan angkatan kerja semakin meningkat, dengan kata lain penambahan penduduk akan berimplikasi terhadap ketersediaan kesempatan baru.

Kebutuhan akan kesempatan kerja baru tidak hanya diperlukan bagi angkatan kerja baru akan tetapi juga bagi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan pada tahun tahun sebelumnya. Stereotipe penduduk tentang posisi dan kedudukan antara laki-laki yang berbeda

mulkan pembagian pekerjaan yang turun temurun di penduduk.



Laki-laki melakukan kegiatan produktif dan istri untuk melakukan kegiatan reproduktif.

Soerjono (2009), menyatakan bahwa, kelembagaan yang ada di penduduk didominasi oleh laki-laki karena perempuan tidak memiliki banyak waktu setelah melakukan kegiatan reproduktif. Informasi yang diterima juga berbeda karena laki-laki yang memiliki lahan dan melakukan kegiatan di bidang pertanian mendapatkan penyuluhan hampir semuanya adalah laki-laki. Kondisi perempuan yang terkadang lemah pada saat akan menstruasi, hamil bahkan melahirkan menjadi alasan perusahaan perkebunan negara maupun swasta mempertimbangkan pekerjaan yang akan mereka berikan kepada perempuan. Alasan berkait kondisi perempuan juga berpengaruh terhadap status mereka di perkebunan dengan mempekerjakan perempuan sebagai pekerja harian lepas bukan menjadi pegawai tetap. Akibat dari itu fasilitas yang diterima (pekerja harian lepas) terbatas. Faktor yang mempengaruhi perubahan lapangan kerja, yaitu:

1. Kondisi perekonomian, dimana pesatnya roda perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi, kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja. Jadi banyak perusahaan yang menambah tenaga kerja baru.

Pertumbuhan penduduk, kualitas pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oleh



sebab itu semakin tinggi jumlah penduduk akan mengurangi kesempatan orang untuk bekerja.

3. Produktivitas/kualitas sumber daya manusia, tingginya produktivitas dan kualitas sumber daya seseorang akan mendorong tingginya tingkat kesempatan kerja, dan sebaliknya kualitas sumber daya manusia yang rendah akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.
4. Tingkat upah, kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas produksi akan menyebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya, hal tersebut akan menurunkan tingkat kesempatan kerja.

#### **D. Hasil Penelitian Relevan**

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam perubahan sosial yang diakibatkan oleh berubahnya kondisi fisik suatu wilayah, masing-masing diantaranya adalah :

1. Jurnal yang berjudul “ Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, Jakarta ”. Penelitian ini ditulis oleh Darma Utama, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis dan Ekonomi Perikanan-Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2006. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengaruh kenaikan harga BBM terhadap usaha perikanan tangkap



dan juga kondisi sosial ekonomi nelayan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui presentase komponen biaya BBM terhadap total biaya sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM serta untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, yakni penelitian mengenai status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari keseluruhan personalitas. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter khas dari kasus ataupun status dari fokus penelitian, yaitu nelayan ABK dengan kapasitas kapal 5 GT ke bawah. Adapun hasil analisis dampak kenaikan harga BBM terhadap presentase komponen biaya BBM terhadap total biaya usaha perikanan tangkap nelayan 5 GT ke bawah diketahui bervariasi menurut alat tangkap yang digunakan, yaitu dengan alat tangkap bubu rajungan, jaring rampus, gillnet dan jaring tangsi menunjukkan adanya kenaikan total biaya usaha pasca kenaikan harga BBM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan diketahui juga bervariasi menurut indikator yang digunakan.

Kesejahteraan menurut indikator keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan, kehidupan beragama, dan kemudahan

melakukan kegiatan olah raga tidak mengalami perubahan.

Presentase perubahan kesejahteraan nelayan bervariasi berdasarkan



indikator pendapatan, pengeluaran, kemudahan mendapatkan fasilitas kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, dan rasa aman dari gangguan kejahatan.

2. Tesis yang berjudul “ Kajian Reklamasi Pantai Dadap, Kabupaten Tangerang (Sebuah Analisis Persepsi Stakeholder)”, yang ditulis oleh mahasiswi strata dua (S2) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) bernama Indrani Dharmayanti pada tahun 2006. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat dan stakeholder terhadap rencana kebijakan reklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi masyarakat mengenai kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di sekitar Pantai Dadap, serta mengetahui pengaruh reklamasi tersebut terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dari hasil pengumpulan data primer melalui wawancara dengan masyarakat yang dianalisa dengan cara analisa persepsi dan uji jenjang bertanda, membuktikan bahwa kondisi lingkungan di sekitar areal reklamasi pada periode sebelum tahun 2000 kondisinya masih tergolong baik, sedangkan setelah itu yaitu periode tahun 2000-2005 kondisi lingkungan mengalami penurunan.

Sementara kondisi sosial masyarakat tidak terlalu berpengaruh,

ya terjadi peningkatan konflik antar warga nelayan yang  
ibatkan oleh penyempitan dan pendangkalan sungai yang sering



menyebabkan tabrakan kapal yang berujung konflik. Sedangkan secara ekonomi, dampak negatif yang dihasilkan lebih besar daripada dampak positifnya, terlihat dari berkurangnya manfaat lingkungan pesisir sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kecendrungan akan masalah sosial-ekonomi akan lebih signifikan, jika pengembangan wilayah pesisir tidak dikelola secara terpadu.

3. Desertasi yang berjudul “Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan”, yang ditulis oleh Sapto Supomo, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2009. Penelitian ini berisi pembahasan mengenai model pengembangan kawasan Pantura Jakarta secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini meliputi : Menganalisis status keberlanjutan pengembangan kawasan Pantura Jakarta, menganalisis nilai ekonomi total kawasan hutan mangrove di Pantura Jakarta, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dalam pemanfaatan ruang kawasan Pantura Jakarta, menganalisis keterkaitan antar aspek ekologi, ekonomi, dan sosial di kawasan Pantura Jakarta, dan menyusun arahan kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang berkelanjutan. Model analisis pengembangan kawasan pantai utara Jakarta yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kondisi keberlanjutan menggunakan

multi dimensional scaling dan analisis kebutuhan stakeholder dengan mode need assesment, perhitungan nilai ekonomi total kawasan



dengan menggunakan *total economic valuation*, analisis sistem dinamik, dan *analytical hierarchy process* untuk menentukan prioritas kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan. Pembangunan kawasan pantura Jakarta belum mencapai kondisi keberlanjutan. Dari lima dimensi yang dianalisis, hanya dimensi kelembangaan yang telah mencapai status berkelanjutan sedangkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi belum berkelanjutan. Dari penelitian pertama, ketiga dan keempat, diketahui bahwa permasalahan lingkungan merupakan hasil dari kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan, terutama dalam kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Pola permasalahan lingkungan menyerupai siklus, yaitu manusia sebagai titik temu antara sebab dan akibat permasalahan lingkungan.

Perubahan lingkungan akibat pembangunan, meniscayakan berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta kondisi ekologis kawasan pembangunan tersebut. Penelitian pertama dan kedua menjadi acuan utama dalam mendeskripsikan dan menyajikan data-data sosial ekonomi masyarakat, namun dalam penelitian ini metode yang dipakai yaitu metode survey dengan pendekatan

statistif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh data statistik dari subjek penelitian dan yang dijadikan indikator



perubahan hanya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Disamping itu, penelitian keempat juga merupakan acuan, karena memiliki relevansi dalam menunjang penelitian ini, antara lain keterkaitan dalam hal kebijakan pengembangan kawasan (reklamasi) dan data-data terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat Muara Angke. Namun dalam penulisan ini analisis yang digunakan disesuaikan dengan kapasitasnya sebagai penulisan skripsi yaitu analisis kuantitatif deskriptif, serta masalah yang akan diungkap lebih bersifat deskripsi berdasarkan hasil survey, bukan untuk menentukan arahan kebijakan pengembangan yang harusnya dilakukan para *stakeholder*.

#### E. Kerangka Berpikir

Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jalan yang ditempuh untuk memperoleh lahan baru yaitu dengan mengadakan kebijakan reklamasi pantai. Begitu juga dengan pembangunan reklamasi yang merupakan hasil pengurukan dan pengerukan lahan. Dengan adanya reklamasi pantai diharapkan tidak hanya dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan, tetapi juga dapat memanfaatkan sumber daya yang

pada proyek reklamasi. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya dari kebijakan reklamasi ini adalah pengembangan serta



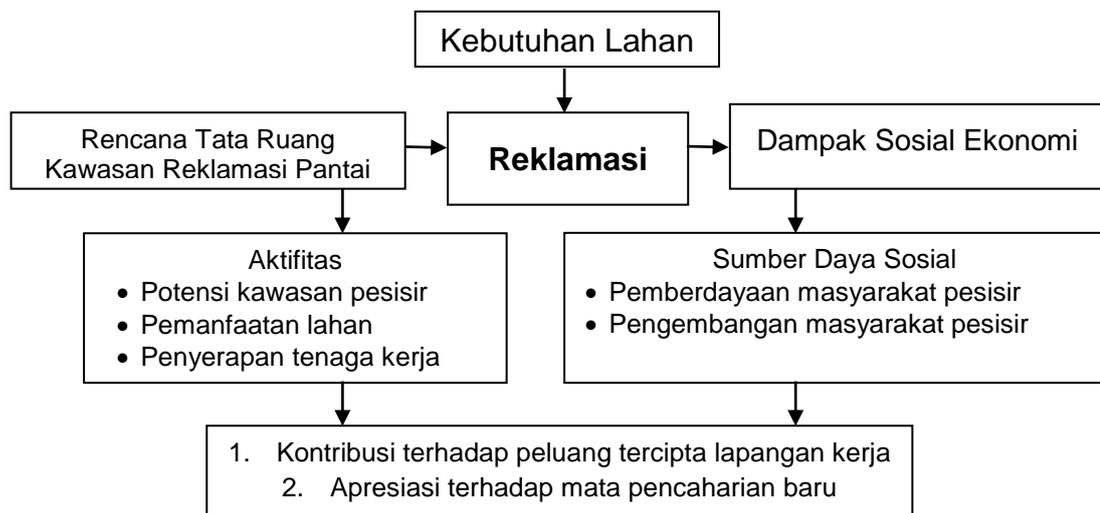
peningkatan taraf sosial-ekonomi masyarakat pesisir, yang diketahui melalui perbandingan pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita rumah tangga sebelum dan sesudah adanya reklamasi.

Pemberdayaan pemuda pesisir harus dikelola secara optimal sehingga kondisi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan standar kesejahteraan dapat terwujud secara perlahan, tentunya hal ini memerlukan perencanaan yang terpadu dan analisis dampak yang tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik atau lingkungan saja, tetapi juga dampak sosial- ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan, serta peranan pedoman melaksanakan reklamasi dan kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan lautan yang dapat menentukan masa depan potensi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Reklamasi termasuk faktor eksternal yang menyebabkan perubahan social - ekonomi. Dengan berubahnya kondisi fisik lingkungannya, masyarakat berusaha menyesuaikan diri (adaptasi) dan melakukan peralihan-peralihan segala aktivitas sosial-ekonomi sebagai upaya untuk bertahan dengan kondisi lingkungan yang baru. Dalam proses penyesuaian ini tidak semua individu dikatakan berhasil dan merasakan dampak positif dari reklamasi, sebagian dari mereka menemukan kegagalan dalam proses penyesuaian ini, sehingga harus merasakan dampak negatif dari suatu perubahan lingkungan (reklamasi).

Dengan demikian, dapat dirangkaikan suatu asumsi bahwa jika reklamasi di Kota Sorong memberikan suatu dampak penyerapan



tenaga kerja bagi pemuda di Distrik Sorong Kota khususnya di Kawasan Pantai Tembok Berlin, maka hal ini akan memudahkan penyesuaian kondisi sosial-ekonomi masyarakat terhadap kehadiran reklamasi, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan reklamasi serta kecenderungan dampak positif reklamasi dapat dirasakan secara signifikan.



**Gambar 1** Kerangka Berpikir

